

PERANAN TUPITU NAKAF ABRAHAM BAITANU DALAM PEMEKARAN WILAYAH PENKASE DARI MASA WILAYAH KETEMUKUNGAN HINGGA MENJADI WILAYAH DESA PADA TAHUN 1965-1998

Oktofian Lasarus Taebenu^a, Maria Lodika Long^b, Reky Lediana Banu^c

Universitas Persaruan Guru 1945 NTT, taebnufhyan@gmail.com

Universitas Persaruan Guru 1945 NTT, marialodika30@gmail.com

Universitas Persaruan Guru 1945 NTT, rekybanu01@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 1 Mei 2025

Direvisi: 5 Mei 2025

Disetujui: 10 Mei 2025

Keywords:

Abraham Baitanu, Penkase, Ketemukungan, Regional Expansion, Local History.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi awal wilayah Penkase sebelum kepemimpinan Abraham Baitanu, menganalisis proses terpilihnya Abraham Baitanu sebagai temukung pada tahun 1965, mengidentifikasi kebijakan-kebijakan yang diterapkannya, serta menjelaskan peranan Abraham Baitanu dalam pemekaran wilayah Penkase dari sistem ketemukungan menjadi desa. Subjek penelitian ini adalah wilayah Penkase dan tokoh Abraham Baitanu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah, melalui tahapan heuristik untuk mengumpulkan sumber, kritik sumber untuk menilai keaslian dan kredibilitasnya, interpretasi untuk memaknai data yang ditemukan, dan historiografi sebagai tahapan penulisan sejarah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penkase awalnya merupakan wilayah ketemukungan dengan sistem pemerintahan tradisional yang kental. Abraham Baitanu, setelah terpilih sebagai temukung, melakukan berbagai kebijakan progresif, termasuk penguasaan wilayah Oeleta dan menjadikan Penkase sebagai desa mandiri. Peran krusial Abraham Baitanu sangat menonjol dalam transformasi Penkase dari struktur ketemukungan menjadi desa, yang secara signifikan memengaruhi perkembangan sosial dan administratif wilayah tersebut pada periode 1965-1998.

Alamat korespondensi:

Jl. Perintis Kemerdekaan III, No 40, Kota Baru, Kupang

E-mail: Jss45@gmail.com

p-ISSN: 2623-1646

e-ISSN: 2986-4038

PENDAHULUAN

Monumen patung Abraham Baitanu yang berdiri tegak di Penkase menjadi titik tolak utama penelitian ini. Monumen ini bukan sekadar penanda fisik, melainkan simbol yang mengisyaratkan kontribusi besar dan pengakuan atas dedikasi seorang tokoh lokal. Hal ini mendorong peneliti untuk mengkaji arti dan tujuan di balik pendirian monumen tersebut, serta menggali perjuangan besar tokoh yang digambarkannya. Perjalanan panjang dan peran krusial Abraham Baitanu dalam mentransformasi Penkase dari wilayah ketemukungan hingga menjadi desa mandiri adalah fokus utama kajian ini.

Pada periode krusial 1965 hingga 1998, wilayah Penkase-Oeleta mengalami transformasi besar seiring dengan kebijakan nasional mengenai standarisasi struktur pemerintahan. Dahulu, wilayah ini merupakan bagian dari bekas kefetoran Taebenu dan dipimpin oleh serangkaian pemimpin bergelar Tupitu Nakaf, sebuah gelar yang mencerminkan otoritas dan kedudukan dalam tatanan adat setempat. Abraham Baitanu muncul sebagai temukung terakhir, dikenal berani dan inovatif, membawa perubahan signifikan yang menjadikan Penkase lebih maju dan mampu menggabungkan Oeleta, hingga akhirnya menjadi desa mandiri.

Perkembangan suatu wilayah, khususnya dalam konteks pemekaran administratif, seringkali melibatkan peran sentral individu atau kelompok visioner. Studi-studi sebelumnya telah menyoroti dinamika pemerintahan lokal dan peran tokoh adat, seperti penelitian Arifin (2018) tentang adaptasi kebijakan pemerintah pusat di pedesaan Nusa Tenggara Timur, dan kajian Lestari dan Santoso (2021) tentang dampak perubahan struktur pemerintahan tradisional terhadap kesejahteraan masyarakat terpencil. Namun, belum banyak penelitian yang secara spesifik mengkaji peranan Tupitu Nakaf Abraham Baitanu dalam perkembangan wilayah Penkase dari masa ketemukungan hingga menjadi desa pada periode 1965-1998.

Untuk memahami peranan Abraham Baitanu secara komprehensif, penelitian ini menggunakan metode sejarah. Metode ini dianggap paling sesuai untuk merekonstruksi dan menganalisis peristiwa masa lalu secara sistematis. Tahapannya meliputi heuristik (pengumpulan sumber seperti dokumen arsip, catatan lokal, wawancara saksi sejarah), kritik sumber (menilai keaslian dan kredibilitas sumber), interpretasi (menganalisis dan memaknai data untuk membangun narasi koheren), dan historiografi (penulisan hasil interpretasi dalam bentuk ilmiah). Pendekatan ini memungkinkan peneliti merekonstruksi peristiwa masa lalu secara akurat dan objektif, serta menganalisis peran Abraham Baitanu dalam konteks sosial, politik, dan administratif pada masanya.

Indonesia, sebagai negara kepulauan, memiliki sejarah panjang penataan wilayah administratifnya. Sejak proklamasi kemerdekaan, pembagian wilayah terus berkembang, seperti penetapan delapan provinsi pada sidang PPKI kedua tanggal 19 Agustus 1945. Perkembangan berlanjut di era Demokrasi Terpimpin (1950-1966) dengan pemekaran provinsi, termasuk Sunda Kecil yang pada 1959 dimekarkan menjadi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (NTT). NTT sendiri resmi berdiri pada 1958 berdasarkan Undang-Undang Nomor 18. Perkembangan wilayah di NTT, khususnya Kota Kupang, menunjukkan peningkatan signifikan meskipun kondisi awal sosial dan ekonomi belum pesat. Wilayah ini kaya akan sejarah sistem pemerintahan tradisional ketemukungan, yang dipimpin oleh temukung, mirip kepala desa, dan masih kental terutama di wilayah pesisir.

Berdasarkan latar belakang ini, rumusan masalah penelitian adalah bagaimana kondisi awal wilayah Penkase pada masa kepemimpinan temukung-temukung sebelumnya; bagaimana proses terpilihnya Abraham Baitanu sebagai temukung dan jalannya proses pemerintahan temukung Abraham Baitanu di wilayah Penkase pada tahun 1965; kebijakan apa yang dilakukan Abraham Baitanu dalam perkembangan wilayah Penkase; dan bagaimana peranan Abraham Baitanu dalam proses pemekaran wilayah Penkase dari sistem pemerintahan temukung hingga menjadi wilayah desa.

Adapun tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan kondisi awal wilayah Penkase pada masa kepemimpinan temukung-temukung sebelumnya; mendeskripsikan proses terpilihnya Abraham

Baitanu sebagai temukung dan jalannya proses pemerintahan temukung Abraham Baitanu di wilayah Penkase pada tahun 1965; mendeskripsikan kebijakan apa yang dilakukan Abraham Baitanu dalam perkembangan wilayah Penkase; dan mendeskripsikan peranan Abraham Baitanu dalam proses pemekaran wilayah Penkase dari sistem pemerintahan temukung hingga menjadi wilayah desa. Melalui tujuan-tujuan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman sejarah lokal dan peran kepemimpinan adat dalam konteks transformasi administratif di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini secara cermat menguraikan pendekatan metodologis yang digunakan untuk mengkaji peranan Tupitu Nakaf Abraham Baitanu dalam perkembangan wilayah Penkase. Seluruh tahapan, mulai dari desain penelitian hingga analisis data, dirancang untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan. Penelitian ini mengadopsi desain historis, yang berfokus pada rekonstruksi dan interpretasi peristiwa masa lalu, khususnya periode 1965-1998 terkait peranan Abraham Baitanu. Lokasi penelitian dipilih di Kelurahan Penkase-Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, karena keberadaan monumen Abraham Baitanu, status wilayah sebagai area kepemimpinannya, dan ketersediaan data. Waktu penelitian akan disesuaikan dengan ketersediaan informan dan akses sumber data.

Dalam penelitian kualitatif historis ini, penentuan informan kunci dan sumber data sangat esensial. Informan dipilih menggunakan purposive sampling, yaitu berdasarkan kriteria spesifik peneliti: mereka memiliki pengetahuan mendalam dan dapat memberikan informasi akurat mengenai peranan Abraham Baitanu dari masa ketemukungan hingga desa pada 1965-1998. Informan meliputi tokoh adat, tokoh masyarakat, perwakilan pemerintah Kelurahan Penkase-Oeleta, serta keturunan langsung Abraham Baitanu, dengan kriteria usia minimal 50 tahun, sehat jasmani rohani, kejujuran, dan pemahaman mendalam tentang topik. Sumber data terbagi menjadi primer (kesaksian wawancara langsung dan dokumen asli) dan sekunder (buku, brosur, koran, publikasi internet, dan referensi relevan lainnya). Observasi langsung terhadap peninggalan sejarah di Penkase pada masa Abraham Baitanu, seperti jalan, sekolah, gereja, dan rumah desa, juga dilakukan dan didokumentasikan melalui foto.

Pengumpulan data dilakukan melalui kombinasi beberapa teknik. Wawancara terstruktur menjadi teknik utama untuk menggali informasi dari informan, berdialog langsung dengan pertanyaan yang telah disiapkan. Observasi dilakukan di lokasi penelitian untuk mengamati langsung objek penelitian dan didokumentasikan dengan kamera. Studi pustaka melibatkan penelusuran literatur untuk kerangka teoritis dan perbandingan data lapangan, memahami konsep sejarah, peranan, ketemukungan, dan pemekaran wilayah. Terakhir, studi dokumen mencakup penyelidikan benda-benda tertulis seperti arsip dan catatan yang berkaitan dengan masa kepemimpinan Abraham Baitanu, membantu verifikasi informasi dan mendapatkan gambaran objektif.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis historis, melibatkan empat tahapan utama. Pertama, heuristik (pengumpulan data), yaitu penentuan dan pengumpulan sumber sejarah yang relevan (tulisan, lisan, benda). Kedua, verifikasi (kritik sumber), di mana kebenaran dan kredibilitas sumber diuji melalui kritik eksternal (keaslian) dan internal (isi), khususnya untuk sumber lisan yang memerlukan dukungan saksi jujur dan fakta teruji. Ketiga, interpretasi (penafsiran), di mana peneliti memaknai data yang terkumpul, menghubungkan fakta-fakta secara sebab-akibat. Keempat, historiografi (penulisan sejarah), yaitu puncak penelitian di mana seluruh temuan dan analisis disajikan dalam narasi ilmiah yang sistematis dan mudah dipahami, merepresentasikan sejarah sebagaimana terjadinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Bagian ini menyajikan temuan-temuan yang diperoleh dari penelitian lapangan, meliputi gambaran umum wilayah studi serta data kondisi awal dan proses transformasi yang terkait dengan peranan Abraham Baitanu.

Gambaran Umum Wilayah Penelitian: Kelurahan Penkase-Oeleta

Kelurahan Penkase-Oeleta, yang terbentuk pada 12 Agustus 2010, terletak di Kecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Wilayah ini berbatasan dengan Kelurahan Namosain dan Nunbaun Sabu di Utara; Manulai II dan Alak di Selatan; Batuplat, Nunbaun Sabu, dan Manutapen di Timur; serta Alak di Barat. Dengan luas 9,13 Km², kelurahan ini terbagi menjadi 8 RW dan 35 RT. Topografinya didominasi dataran tinggi berbukit dan berbatu, dengan jenis tanah Asosiasi Haplusterst Ustrothents dan beberapa tanggul. Beriklim tropis dengan dua musim, curah hujan rata-rata 1.250 mm/tahun, menyebabkan tanah kurang subur. Sekitar 70% masyarakat berprofesi sebagai petani dan peternak. Flora didominasi jati, gamal, kelor, serta tanaman tani seperti padi, jagung, mangga, dan bawang. Fauna utama adalah binatang piaraan seperti sapi, kuda, kambing, dan ayam.

Secara sosial, jumlah penduduk per Januari 2025 adalah 8.309 jiwa (4.265 laki-laki, 4.045 perempuan). Sarana pendidikan meliputi 3 TK, 4 PAUD, 2 SD/MI, 1 SLTP/MTs, 2 SMK/SMU, dan 1 kampus (STTI Kupang). Kesehatan didukung 1 Puskesmas dan 10 Posyandu Balita. Sarana peribadatan meliputi 3 Gereja Protestan, 1 Gereja Katolik, 5 Gereja Denominasi, 4 Masjid, dan 3 Mushola. Fasilitas olahraga tersedia 1 lapangan sepak bola, 5 futsal, dan 1 voli. Keamanan didukung 2 pos kamling, dengan Polsek Alak sebagai penopang. Mata pencarian utama masyarakat adalah wiraswasta.

Pemerintahan Kelurahan Penkase-Oeleta dipimpin oleh seorang Lurah, Peter F. Nenohaifeto, S.Pt., dibantu oleh Sekretaris, Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Seksi Pelayanan Masyarakat, serta Ketua RT dan RW.

Hasil Penelitian Khusus Peranan Abraham Baitanu

Wilayah Penkase memiliki sejarah panjang sistem ketemukung. Nama "Penkase" berasal dari "tempat mengintip dari ketinggian," sebelumnya "Kuan Pene" atau "Kun Pene" dalam bahasa Tetun. Sekitar tahun 1930, Penkase dipimpin Raja Laes Tupitu Oematan, dilanjutkan anaknya, Bell Tupitu Oematan (±1930-1955). Sistem pemerintahan melibatkan Temukung, Ma'feffa, dan Amanasit, dengan penetapan temukung berdasarkan garis keturunan. Antara 1946-1967, Penkase dipimpin oleh beberapa temukung, termasuk Thomas Baitanu (1946-1950), ayah Abraham Baitanu. Pada masa Thomas Baitanu, Penkase masih sunyi di bawah kefetoran Mantasi.

Abraham Baitanu, putra Thomas Baitanu, memimpin Penkase dari 1965-1967 dengan gelar Tupitu Nakaf (Kepala Kampung/Suku). Pengangkatannya secara turun-temurun. Awalnya, ia menjabat Panitra (sekretaris Kefetoran) di Mantasi karena usianya yang muda. Sekitar 1969-1970, Penkase berpisah dari Mantasi akibat ketidakseimbangan pembangunan. Abraham Baitanu berinisiatif merangkul Oeleta, yang dipimpin Temukung Tossi Nakaf, untuk bergabung. Setelah penggabungan ini pada 1971, Abraham Baitanu terpilih sebagai kepala desa pertama Desa Penkase, atas kesepakatan masyarakat dan tua-tua adat, sebagai pengakuan perannya dalam pemisahan dan penggabungan wilayah.

Kepemimpinan Abraham Baitanu sebagai kepala desa Penkase berlangsung empat tahun. Pada 1976, Desa Penkase bergabung dengan Desa Alak karena perluasan wilayah Kota Kupang (berstatus kabupaten) antara 1970-1978. Dalam pemilihan kepala desa Alak yang demokratis, Abraham Baitanu memperoleh suara terbanyak dan menjadi Kepala Desa Alak. Selama menjabat, ia menerapkan berbagai kebijakan pembangunan signifikan, didukung program PELITA. Ia dikenal tegas, disiplin,

pekerja keras, dan berjiwa membangun, memprioritaskan infrastruktur seperti jalan swadaya masyarakat. Di sektor ekonomi, ia memberdayakan masyarakat melalui tenun ikat dan pertanian, serta peternakan. Kebijakan ini membuatnya bertahan ±32 tahun. Pada 1992, ia digantikan Marthinus Nenogasu sebagai Kepala Desa kalteker (pejabat sementara) karena perubahan status Kota Kupang menjadi Kotamadya (1996). Sistem desa berganti kelurahan, dengan Dr. Kotten sebagai Lurah pertama Alak. Akhirnya, pada 2010, Kelurahan Penkase-Oeleta dimekarkan atas persetujuan pemerintah dan tokoh adat setempat, menggabungkan Penkase dan Oeleta.

Pembahasan

Bagian pembahasan ini menginterpretasikan dan menganalisis temuan-temuan penelitian yang telah disajikan pada bagian hasil, mengaitkannya dengan tujuan penelitian, serta membandingkannya dengan kerangka teoritis dan penelitian relevan lainnya. Fokus utama adalah pada makna di balik transisi pemerintahan di Penkase dan peranan krusial Abraham Baitanu.

Latar Sosial dan Budaya Masyarakat Penkase Sebelum Transisi dan Peran Abraham Baitanu sebagai Tokoh Transisi

Sebelum adanya intervensi sistem pemerintahan modern, masyarakat Penkase telah memiliki struktur sosial dan budaya yang kuat melalui sistem ketemukungan. Dalam konteks ini, temuan penelitian yang menunjukkan bahwa ketemukungan Penkase dipimpin oleh seorang temukung yang bertanggung jawab atas penyelesaian sengketa, pengelolaan tanah, dan pelaksanaan upacara adat, selaras dengan konsep pemerintahan adat yang dijelaskan oleh Suparlan (2004) tentang masyarakat adat di Indonesia yang memiliki kearifan lokal dalam mengatur kehidupannya. Sistem ini mencerminkan otonomi lokal yang kuat, di mana marga-marga memiliki wilayah kelola adat, termasuk tanah, sumber mata air, dan lahan pertanian, menunjukkan pola kepemilikan komunal yang khas. Konsep ini diperkuat oleh pandangan Sartono Kartodirdjo (1993) mengenai pentingnya struktur sosial tradisional sebagai fondasi masyarakat agraria. Dengan demikian, transisi ke sistem desa bukan hanya sekadar perubahan administratif, melainkan sebuah transformasi fundamental yang berpotensi menggeser nilai, otoritas, dan sistem kontrol sosial yang telah mengakar.

Di tengah kompleksitas transisi ini, kemunculan Abraham Baitanu sebagai tokoh transisi merupakan fenomena yang sangat penting. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa ia dihormati karena latar belakang adat yang kuat dan kemampuannya memahami sistem pemerintahan modern, mengindikasikan bahwa Abraham Baitanu adalah broker budaya atau agen perubahan (Rogers, 2003) yang mampu menjembatani dua sistem yang berbeda. Keterlibatannya dalam urusan sosial dan pemerintahan lokal sejak pertengahan 1960-an, saat pemerintah menerapkan kebijakan pembentukan desa administratif, menunjukkan bahwa ia proaktif dalam merespons perubahan dari pusat. Ini sejalan dengan studi oleh Fox (2012) yang menekankan pentingnya peran individu kharismatik dalam memfasilitasi adaptasi masyarakat adat terhadap kebijakan baru. Abraham Baitanu tidak sekadar pasif mengikuti perubahan, tetapi aktif memandu masyarakatnya dalam menghadapi standarisasi struktur pemerintahan dari tingkat nasional.

Peran Strategis Abraham Baitanu dalam Proses Pemekaran dan Transisi

Juru Damai antara Sistem Adat dan Negara Temuan penelitian yang menunjukkan kemampuan Abraham Baitanu sebagai perantara antara dunia adat dan negara sangatlah signifikan. Ia berhasil memahami kekhawatiran masyarakat akan hilangnya kontrol atas tanah adat, ritus budaya, dan otoritas temukung, sementara di sisi lain juga menyadari urgensi pembangunan dan efisiensi sistem pemerintahan desa. Peran ini sesuai dengan konsep kepemimpinan transformasional (Bass & Riggio, 2006) yang mampu mengubah perspektif dan menginspirasi pengikut untuk mencapai tujuan bersama. Melalui pendekatan musyawarah dan komunikasi adat, Abraham Baitanu mendorong masyarakat untuk bersikap kritis dan konstruktif terhadap pembentukan desa, bukan menolak secara mentah-

mentah. Ini menunjukkan kemampuannya dalam membangun dialog dan konsensus, yang krusial dalam konteks perubahan sosial besar. Memfasilitasi pertemuan adat untuk membahas pembagian wilayah, penetapan batas desa, dan pemilihan tokoh masyarakat untuk struktur desa, menunjukkan bahwa ia adalah fasilitator aktif dalam proses adaptasi ini. Penguatan Posisi Struktur Adat dalam Sistem Pemerintahan Baru Meskipun sistem ketemukungan tidak lagi diakui secara formal, hasil penelitian menunjukkan upaya Abraham Baitanu dalam menjaga agar lembaga adat tetap memiliki tempat. Ini tercermin dari dorongannya agar temukung tetap dilibatkan dalam pengambilan keputusan desa, terutama yang menyangkut tanah dan kegiatan budaya. Fenomena ini mengindikasikan bahwa Abraham Baitanu menerapkan strategi bottom-up dalam integrasi pemerintahan, di mana nilai-nilai lokal tetap dipertahankan meskipun struktur formal berubah. Ini konsisten dengan pandangan para ahli antropologi politik (misalnya, Scott, 1976) yang seringkali menyoroti bagaimana masyarakat adat melakukan negosiasi atau resistensi halus terhadap kebijakan pemerintah. Abraham menjembatani komunikasi antara kepala desa yang baru dilantik dengan tokoh adat, bahkan berhasil memastikan keputusan desa tidak bertentangan dengan norma adat. Ini menunjukkan kemampuannya dalam diplomasi internal dan advokasi yang efektif untuk menghargai peran simbolik temukung sebagai penjaga nilai leluhur, sebuah bentuk kearifan lokal dalam adaptasi.

Advokasi atas Pengakuan Wilayah Adat dan Tanah Komunal Perubahan struktur pemerintahan membawa serta perubahan dalam pengelolaan tanah, dari kepemilikan komunal ke individu. Dalam situasi ini, Abraham Baitanu muncul sebagai pembela hak-hak masyarakat adat. Ia memimpin upaya identifikasi dan pemetaan tanah-tanah adat serta memperjuangkan pengakuan legal terhadap tanah ulayat di hadapan pemerintah. Peran ini sangat penting karena isu tanah adat sering menjadi titik konflik dalam modernisasi pemerintahan. Studi oleh Harimurti (2015) tentang reformasi agraria di Indonesia juga menyoroti peran sentral tokoh lokal dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat adat. Abraham Baitanu juga berperan sebagai negosiator kunci antara masyarakat dan pihak luar, seperti pemerintah kota atau pengembang, terutama dalam kasus pengambilan lahan untuk pembangunan umum. Ini menggarisbawahi posisinya sebagai pelindung kepentingan masyarakat adat di tengah tekanan modernisasi dan pembangunan.

Edukasi Sosial tentang Nilai Adat di Tengah Modernisasi Selain peran formal, Abraham Baitanu juga aktif dalam kegiatan edukatif untuk menjaga nilai-nilai adat. Temuan bahwa ia sering mengadakan diskusi adat informal, mengajarkan kembali praktik-praktik seperti ntoni, dan menekankan pentingnya solidaritas marga, menunjukkan komitmennya terhadap pelestarian budaya. Ini adalah bentuk cultural resilience (ketahanan budaya) di mana seorang pemimpin tidak hanya fokus pada struktur, tetapi juga pada penguatan identitas dan nilai-nilai. Temuan bahwa Abraham berhasil membangun kesadaran di kalangan muda bahwa menjadi bagian dari pemerintahan desa bukan berarti harus meninggalkan adat adalah hal yang luar biasa. Ia mendorong generasi muda untuk terlibat dalam struktur pemerintahan formal sambil tetap menjadi penjaga nilai-nilai budaya lokal. Hal ini mencerminkan pendekatan integratif yang memastikan bahwa modernisasi tidak berarti penghapusan identitas budaya, melainkan adaptasi yang cerdas.

Dampak Jangka Panjang dari Kepemimpinan Abraham Baitanu

Dampak kepemimpinan Abraham Baitanu melampaui masa pembentukan desa dan berlanjut hingga masa setelah kelurahan mulai terbentuk (akhir 1990-an). Nilai-nilai kolaborasi antara adat dan negara yang ia tanamkan menjadi fondasi penting dalam kehidupan sosial masyarakat Penkase saat ini. Fakta bahwa banyak struktur sosial modern seperti RT/RW dan LPM tetap berkomunikasi erat dengan tokoh adat menunjukkan bahwa Abraham telah meletakkan dasar bagi sistem pemerintahan yang tidak memutuskan akar budaya, melainkan menyinergikannya. Hal ini mendukung pandangan bahwa perubahan sosial yang berkelanjutan seringkali berakar pada kepemimpinan lokal yang adaptif dan visioner. Cara Abraham Baitanu memfasilitasi transisi ini menjadi model kepemimpinan lokal yang

patut dicontoh di wilayah lain yang mengalami situasi serupa. Ia membuktikan bahwa tokoh lokal dapat bertindak sebagai agen perubahan sekaligus penjaga nilai-nilai budaya secara bersamaan, yang sangat relevan dalam konteks pembangunan berkelanjutan yang menghargai identitas lokal.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara komprehensif peranan Tupitu Nakaf Abraham Baitanu dalam perkembangan wilayah Penkase dari sistem ketemukungan hingga menjadi wilayah desa pada periode 1965-1998, serta menganalisis kondisi awal wilayah dan kebijakan yang ditempuh Abraham Baitanu. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa wilayah Penkase memiliki akar sejarah yang kuat dalam sistem ketemukungan dengan pemimpin bergelar Tupitu Nakaf, di mana masyarakat hidup dalam tatanan adat yang mengatur berbagai aspek kehidupan. Abraham Baitanu, sebagai temukung terakhir, memainkan peran sentral dalam proses transisi ini. Ia tidak hanya terpilih sebagai temukung pada tahun 1965 melalui sistem garis keturunan, tetapi juga menunjukkan kepemimpinan adaptif dengan menjabat sebagai Panitra di Kefetoran Mantasi dan, yang paling signifikan, menginisiasi pemisahan Penkase dari Mantasi serta penggabungan dengan Oeleta pada akhir 1960-an. Keputusan ini berujung pada terpilihnya ia sebagai kepala desa pertama Penkase pada tahun 1971, dan kemudian Kepala Desa Alak pada tahun 1976 setelah penggabungan dengan Desa Alak.

Selama masa kepemimpinannya, Abraham Baitanu menerapkan berbagai kebijakan transformatif di bidang sosial, ekonomi, dan infrastruktur. Ia memprioritaskan pembangunan jalan raya secara swadaya, memberdayakan masyarakat melalui pengembangan tenun ikat dan pertanian, serta memajukan sektor peternakan, yang semuanya berdampak positif pada kemajuan wilayah Penkase. Peranannya dalam proses pemekaran dan transisi sangat strategis, bertindak sebagai juru damai yang menjembatani sistem adat dan negara, serta memperjuangkan pengakuan wilayah adat dan tanah komunal di tengah modernisasi pemerintahan. Lebih jauh, ia aktif dalam edukasi sosial untuk menjaga nilai-nilai adat di kalangan masyarakat, bahkan mendorong generasi muda untuk terlibat dalam struktur pemerintahan formal tanpa meninggalkan identitas budaya lokal. Dampak jangka panjang dari kepemimpinan Abraham Baitanu terlihat dari nilai-nilai kolaborasi antara adat dan negara yang ia tanamkan, menjadi fondasi penting bagi struktur sosial modern di Penkase saat ini. Oleh karena itu, monumen patung Abraham Baitanu di Penkase merepresentasikan pengakuan atas dedikasinya sebagai pemimpin visioner yang berhasil memfasilitasi integrasi sistem adat ke dalam pemerintahan desa, menjaga kesinambungan nilai budaya, sekaligus mendorong pembangunan wilayah.

Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian ini, ada beberapa saran yang dapat ditindaklanjuti. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan studi komparatif mengenai peran tokoh adat dalam transisi pemerintahan di wilayah lain di Nusa Tenggara Timur yang memiliki karakteristik serupa. Penelitian lanjutan dapat memperdalam analisis dampak jangka panjang kebijakan Abraham Baitanu, khususnya dalam aspek keberlanjutan

ekonomi dan pelestarian budaya. Eksplorasi mekanisme adaptasi dan negosiasi antara sistem adat dan kebijakan modern di tingkat lokal juga akan sangat berharga.

Bagi pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kota Kupang dan Kelurahan Penkase-Oeleta, penelitian ini diharapkan menjadi rujukan penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berbasis kearifan lokal. Penting untuk terus melibatkan tokoh adat dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, sebagaimana dicontohkan oleh Abraham Baitanu, agar program pemerintah selaras dengan nilai dan kebutuhan masyarakat. Mengingat perannya, pemerintah dapat mempertimbangkan pengabdian nilai-nilai kepemimpinannya melalui program pendidikan sejarah lokal atau inisiatif pelestarian budaya yang melibatkan generasi muda.

Bagi tokoh masyarakat dan adat di Penkase-Oeleta dan sekitarnya, hasil penelitian ini diharapkan menjadi pengingat akan pentingnya kepemimpinan yang adaptif dan visioner dalam menghadapi perubahan zaman. Semangat kolaborasi antara adat dan negara, seperti yang diperjuangkan Abraham Baitanu, perlu terus dipertahankan dan diturunkan kepada generasi penerus. Memperkuat fungsi dan peran lembaga adat, serta menjadikannya mitra strategis pemerintah kelurahan, akan sangat membantu menjaga keharmonisan dan keberlanjutan pembangunan di wilayah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu amadi. 1998. *Psikologi umum*, Jakarta: PT Rineka cipta
- Burhan. 2006. *Analisis data penelitian kualitatif*. Jakarta: raja grafindo
- Dougherty dan Pritchard. (dilansir dari buku *role ambiguity and role clarity* 2003 oleh Buer dan Jeffrey
- Gottschalk. 1996. *Mengerti sejarah*. Jakarta: universitas Indon
- Gazalba. 1996. *Pengantar sejarah sebagai ilmu*. Jakarta: Bhatara
- Kartodirjo. 1992. *Pendekatan ilmu sosial dalam metodologi sejarah*. Jakarta: gamedia pustaka utama
- Khairullah dan Cahyadin. 2006. *Evaluasi pemekaran wilayah di Indonesia: studi kasus kabupaten Lahat*. Yogyakarta
- Koentjaraningrat. 2004. *Manusia dan kebudayaan di indonesia*, Jakarta: Djambatan
- Kozie, barbar. 2008. *Peran dan mobilitas masyarakat*, Jakarta
- Kollo, M., & Rohi, D. 2022 “ sejarah terbentuknya kefetoran bani-bani di timor tahun 1936 “ *ciencias: jurnal penelitian dan pengemabangan pendidikan*, 5(1),(39-45). Retrieved from, <https://ejournal.upg45ntt.ac.id/ciencias/article/view/73>
- Margono. 2005. *Metode penelitian pendidikan*. Jakarta : PT Rineka Cipta
- Meleong. 2008. *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: PT remaja Rosdakarya
- Poernomosidi. 1979. *Desentralisasi dan otonomi daerah*. Jakarta: Gramedia pustaka utama
- Soekanto. 2002. *Teori peranan*. Jakarta: Bumi aksara
- Uu nomor 78 tahun 2007. *pemekaran wilayah*. Sumatera: universitas andalas
- Widiyatmika. 2007. *Lintasan sejarah Bumi Nusa Cendana*. Kupang: pusat pengembangan Madrasah
- Widja, I Gede. 1998. *Sejarah lokal perspektif dalam pengajaran sejarah*. Jakarta: Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi